



ISBN 978-602-6204-95-0

Prosiding  
Seminar Nasional

# Bahasa, Seni, dan Desain di Era Revolusi Industri 4.0

*Best Practice* dan Hasil Kajian Ilmiah  
Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI)

*Gorontalo, 3- 6 September 2019*

**FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
TAHUN 2019**

*Editor:  
Harto Malik  
Muslimin  
Herman Didipu  
Farid Muhamad*



**Penerbit:  
UNG Press**



## Prosiding Seminar Nasional

# Bahasa, Seni, dan Desain di Era Revolusi Industri 4.0

Best Practice dan Hasil Kajian Ilmiah

Forum Fakultas Bahasa dan Seni Indonesia (FFBSI)

Gorontalo, 3-6 September 2019

### Narasumber:

**Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.**

(Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kemristekdikti)

**Dr. Uwes Anis Chaeruman**

(Kepala Subdirektorat Pengakuan Pembelajaran Khusus, Kemristekdikti)

### Steering Committee:

Prof. Dr. Putu Kerti Nitiasih, M.A.(UNDIKSHA)

Dr. Harto Malik, M.Hum. (UNG)

Dr. Trisakti, M.Si. (UNESA)

Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D. (FS UM)

Dr. Sri Harti Widyastuti, M.Hum. (UNY)

Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd (UNJ)

Dr. Isda Pramuniati, M.Hum. (UNIMED)

Dr. Donal Matheos Ratu, M.Hum (UNIMA)

Dr. Syukur Saud, M.Pd. (FBS UNM)

Dr. Nurlina Syahrir, M.Hum. (FSD UNM)

Dr. Sri Rejeki Urip, M.Hum. (FBS UNNES)

Prof. Dr. Syihabuddin, M.Pd. (FBS UPI)

Dr. Zakarias S. Soetedja, M.Sn. (FPSD UPI)

Prof. Dr. Ermanto, S.Pd., M.Hum. (FBS UNP)

### Susunan Kepanitiaan

Ketua : Rosma Kadir, S.Pd., M.A.

Wakil Ketua 1 : Prof. Dr. Supriyadi, M.Pd

Wakil Ketua 2 : Novi Rusnarty Usu, S.Pd., M.A.

Wakil Ketua 3 : Ipong Niaga, S.Sn., M.Sn

Sekretaris : Farid Muhamad, S.Pd., M.A.

Bendahara : Rahnismawati Hasan, A.Md.

### Reviewer:

Prof. Dr. Supriyadi, M.Pd.

Nonni Basalam, M.A., Ph.D.

Dr. Dakia Djou, M.Hum.

Dr. Rahman Taufiqianto Dako, S.S, M.Hum.

Novi R. Usu, S.Pd., M.A.

Ipong Niaga, S.Sn., M.Sn.

### Editor:

Harto Malik

Muslimin

Herman Didipu

Farid Muhamad

### Redaksi:

Dr. Muslimin, S.Pd., M.Pd.

Alamat: Jln. Jend. Sudirman No. 6

Kota Gorontalo

Email: [forumfbsi@ung.ac.id](mailto:forumfbsi@ung.ac.id)

HP/WA. 081243230260

ISBN : 978-602-6204-95-0

Diterbitkan: September 2019

FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Diterbitkan oleh:  
UNG Press Gorontalo

DAFTAR ISI  
PROSIDING SEMINAR NASIONAL FORUM FAKULTAS BAHASA  
DAN SENI INDONESIA (FFBSI)  
Tanggal 3-6 September 2019  
Horison Nayumi Hotel Gorontalo

HALAMAN SAMPUL.....	i
EDITOR .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi

**BAGIAN 1: REVITALISASI KURIKULUM FBS YANG BERORIENTASI  
PADA LITERASI BARU .....** 1

1. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI DALAM FAKULTAS BAHASA DAN SENI MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI KEEMPAT Ifan Iskandar, FBS Universitas Negeri Jakarta .....	2
2. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH (BUGIS/MAKASSAR) YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU Kembong Daeng, FBS UNM Makassar .....	19 ✓
3. REVITALISASI KURIKULUM FBS UNESA GUNA MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DAN TANTANGAN DUNIA GLOBAL Maria Mintowati, FBS Unesa Surabaya .....	32
4. REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FBS UNESA 2019 DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 Miftachul Amri, Universitas Negeri Surabaya .....	38
5. REVITALISASI KURIKULUM PRODI. PENDIDIKAN BAHASA JERMAN DALAM MENYIKAPI TANTANGAN DUNIA GLOBAL Syamsu Rijal, Muh. Anwar, Misnah Mannahali, Prodi. Pendidikan Bahasa Jerman, FBS. Universitas Negeri Makassar .....	50

# REVITALISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SAstra DAERAH (BUGIS/MAKASSAR) YANG BERORIENTASI PADA LITERASI BARU

**Kembong Daeng**  
Universitas Negeri Makassar  
Kembong.daeng@unm.ac.id

## ABSTRAK

Bahasa, Sastra, dan budaya Bugis/Makassar merupakan salah satu unsur kebudayaan nasional yang harus dijaga, dilestarikan, dan dikembangkan agar dapat tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang semakin pesat. Salah satu upaya yang dilakukan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah UNM menghadapi era industri 4.0 adalah merevitalisasi kurikulum yang berorientasi pada literasi baru. Revitalisasi Kurikulum Prodi Bahasa Daerah berbasis KKNI disesuaikan dengan visi dan misi prodi, profil lulusan, capaian pembelajaran (CP), CPL, bahan kajian, dan perangkat pembelajaran lainnya yang mendukung terselenggaranya pembelajaran inovatif yang berorientasi pada literasi baru. Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama dan diisi sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang secara sederhana dapat dibagi ke dalam beberapa bidang ilmu, misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri. Dengan demikian, Kurikulum Prodi Bahasa dan Sastra Daerah UNM memiliki ciri dan karakteristik tersendiri yaitu menghasilkan alumni yang siap menjadi guru, peneliti, dan tenaga ahli dalam bidang bahasa, sastra, dan budaya Bugis dan Makassar yang unggul dan menguasai literasi baru dalam dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kata kunci: revitalisasi kurikulum, prodi bahasa dan sastra daerah, literasi baru

## A. PENDAHULUAN

Pengembangan kurikulum setiap perguruan tinggi telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses,

dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran (CP). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Universitas Negeri Makassar (UNM) merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membina program studi (Prodi) Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah di bawah naungan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Program studi ini membina dua kekhususan yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Bugis dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Makassar. Minat masyarakat untuk memilih program studi ini semakin meningkat setelah diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang. Menyikapi hal tersebut, Kurikulum Prodi Bahasa Daerah harus direvitalisasi yang berdasarkan pada literasi baru.

Keberadaan kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa Daerah berpijak pada pandangan mengenai inter-relasi pendidikan dan budaya. Perhatian terhadap relasi pendidikan dan budaya telah menjadi salah satu isu krusial dalam ranah pendidikan sejak lama. Ornstein & Levine (1985: 324) mengungkapkan bahwa merupakan lensa yang memberi kontribusi penting dalam membentuk perspektif seseorang memandang realitas. Pendidikan baik sebagai proses maupun institusi berperan dalam transmisi dan transformasi budaya. Konsep budaya sendiri mencakup ranah yang sedemikian luas yang berperan sebagai perekat kondisi mental, cita-cita dan sebagainya. Dengan demikian, ketika dikaitkan dengan budaya menurut pandangan Taba (1962:18) pendidikan mempunyai tiga fungsi, yakni sebagai “preservation and transmission of cultural heritage, instrument for transforming culture, and as the means for individual development.” Hal ini berarti bahwa sekolah sebagai institusi penting dalam masyarakat moderen dituntut perannya dalam mempersiapkan peserta didik yang mampu berperan dalam pemeliharaan pengembangan nilai-nilai budaya. Dalam konteks Indonesia, secara keseluruhan perguruan tinggi harus merevitalisasi kurikulum agar dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan industri yang semakin maju.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Dasar Pemikiran Penyusunan Kurikulum Prodi Bahasa Daerah

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana misalnya paling rendah harus memiliki “kemampuan” yang setara dengan “capaian pembelajaran” yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, dan doktor setara jenjang 9.

Perguruan tinggi dalam menyusun atau mengembangkan kurikulum, wajib mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Tantangan yang dihadapi oleh perguruan tinggi dalam pengembangan kurikulum di era Revolusi Industri 4.0 adalah menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yg berakhlak mulia berdasarkan pemahaman ke-yakinan agama. Perguruan tinggi perlu melakukan reorientasi pe-ngembangan kurikulum yang mampu menjawab tantangan tersebut.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Konsep yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan kemampuan yang pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) ditemukan pada SN-Dikti pada pasal 5, ayat (1), yang menyatakan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan

lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat (1)).

Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran untuk mencapai, dan penilaian.

Landasan hukum yang digunakan untuk pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dinyatakan dalam Gambar-1 di bawah. Perumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Ketrampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Ketrampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti. Sedangkan penyusunan kurikulum selengkapnya mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

## **2. Landasan Penyusunan Kurikulum Prodi Bahasa Daerah**

Penyusunan kurikulum prodi bahasa daerah hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian harus

berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No.12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, serta ketentuan lain yang berlaku. Kurikulum sedianya mampu menghantarkan mahasiswa menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan tertentu, serta membentuk budi pekerti luhur, sehingga dapat berkontribusi untuk menjaga kebhinekaan, meningkatkan kesejahteraan dan kejayaan bangsa Indonesia.

**Landasan filosofis**, memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan (Ornstein & Hunkins, 2014), bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakekat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat (Zais, 1976).

**Landasan sosiologis**, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pebelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pebelajar (Ornstein & Hunkins, 2014, p. 128). Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kebudayaan difahami sebagai bagian dari pengetahuan kelompok (*group knowledge*) (Ross, 1963: 85). Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan kapsul budayanya sendiri (*capsulation*) yang bias, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Kapsulasi budaya sendiri dapat menyebabkan keengganan untuk memahami kebudayaan yang lainnya (Zais, 1976, p. 219).

**Landasan psikologis**, memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berfikir kritis, dan berfikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (*higher order thinking*); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan (Zais, 1976, p. 200); Kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlakul karimah, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh diterminasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945.

**Landasan historis**, kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di era perubahan abad 21, memiliki peran katif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda revolusi industri 5.0.

**Landasan yuridis**, adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang diperlukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembinaan Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan.

Landasan hukum di atas merupakan acuan pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah di Sulawesi Selatan. Salah satu indikator pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah di sekolah adalah tersedianya kurikulum bahasa daerah (Bugis, Makassar, dan Toraja) yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan peserta didik dan relevan dengan kebutuhann masyarakat serta menunjang pemajuan kebudayaan nasional.

### 3. Pengertian yang Digunakan dalam Panduan Kurikulum Prodi Bahasa Daerah

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam makalah ini berdasarkan dokumen Direktorat Pembelajaran. 2019. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Industri 4.0*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan Pendidikan Tinggi. Adapun istilah yang digunakan adalah:

- a) **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- b) **Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keterampilan (Pasal 35 ayat 1).
- c) **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- d) **Profil lulusan** adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. (Buku Panduan Penyusunan KPT 2016).
- e) **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. (KKNI: Pasal 1 (2)).
- f) **Standar kompetensi lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (SN-DIKTI: Pasal 5 (1)).
- g) **Bahan kajian** (*subject matters*) berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yg dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13).
- h) **Materi pembelajaran** adalah berupa pengetahuan (fakta, konsep, prinsip-prinsip, teori, dan definisi), ketrampilan, dan proses (membaca, menulis berhitung, menari, berpikir kritis, berkomunikasi, dll), dan nilai-nilai (Hyman,1973:4).

- i) **Mata kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi (sumber: KBBI) yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
- j) **Literasi data** adalah pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital.
- k) **Literasi Teknologi** adalah memahami cara kerja mesin, dan aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*).
- l) **Literasi manusia** adalah pemahaman tentang humanities, komunikasi, dan desain.

#### 4. Kaitan Kurikulum Prodi Bahasa Daerah dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014). Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut.

Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 di antaranya kemampuan tentang:

- a. literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- b. literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- c. literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang *humanities*, komunikasi dan desain;

Berdasarkan acuan di atas, Tim Pengembang Kurikulum Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah UNM telah merevitalisasi beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut, di

antaranya: (1) Profil Lulusan, (2) Capaian Pembelajaran (CP), (3) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), (4) Nama Mata Kuliah, dan (5) Distribusi Mata Kuliah Setiap Semester. Kurikulum Prodi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah (Bugis dan Makassar) telah dirumuskan mata kuliah yang berorientasi pada literasi baru. Salah satu mata kuliah di Prodi Bahasa Daerah UNM, yaitu mata kuliah menulis lontarak sudah menggunakan aplikasi menulis lontarak dan digitalisasi lontarak, materi ajar menggunakan audivisual, mata kuliah kewirausahaan, bahasa daerah untuk penutur asing (Barbara, Doglas, dan Brandon), Pemanfaatan media online dalam pembelajaran bahasa daerah, Kamus Bugis Makassar Digital, Kamus Arkais. Selengkapnya dapat dilihat pada (Lampiran Kurikulum PBSO).

Selanjutnya, mata kuliah yang berkaitan dengan apresiasi sastra Bugis dan Makassar, dosen pengampu mata kuliah telah mempublikasikan karya melalui digital yang dikenal dengan 'kecapi Bugis', pementasan drama, dan apresiasi puisi Makassar. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang tercapainya pembelajaran yang berorientasi pada literasi baru. Dalam era industri 4.0.

## 5. Struktur dan Deskripsi Matakuliah Kurikulum Prodi PBSO 2019

KURIKULUM 2019 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH  
FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

No.	KodeMK	Mata Kuliah	SKS	W/P
<b>Semester I</b>				
1	19E13C1012	Pendidikan Agama Islam	2	W
	19E13C1022	Pendidikan Agama Protestan		
	19E13C1032	Pendidikan Agama Katolik		
	19E13C1042	Pendidikan Agama Hindu		
	19E13C1052	Pendidikan Agama Budha		
2	19E13C1062	Pendidikan Pancasila	2	W
3	19E13C1072	Bahasa Indonesia	2	W
4	19E13C1083	Fonologi Bahasa Bugis	3	W
	19E13C1093	Fonologi Bahasa Makassar		
5	19E13C1102	Pendidikan Kewarganegaraan	2	W
6	19E13C1112	Bahasa Inggris	2	W
7	19E13C1123	Teori Sastra	2	W
8	19E13C1132	Masyarakat dan Kebudayaan Sulawesi Selatan	2	W
9	19E13C1143	Pengantar Linguistik	3	W
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>	

<b>Semester II</b>				
1	19E13C2012	Pengantar Pendidikan	2	W
2	19E13C2022	Bahasa Makassar	2	W
	19E13C2032	Bahasa Bugis		
4	19E13C2042	Teori Belajar Bahasa	2	W
5	19E13C2053	Morfologi Bahasa Bugis	3	W
	19E13C2063	Morfologi Bahasa Makassar		
6	19E13C2073	Marangkalinga Ugi	3	W
	19E13C2083	Appinaknak Mangkasarak		
7	19E13C2093	Maqbaca Lontarak	3	W
	19E13C2103	Ammaca Lontarak		
8	19E13C2113	Folklor	3	W
9	19E13C2122	Transliterasi Lontarak dan Penerjemahan	2	W
<b>Jumlah</b>			<b>20</b>	
<b>Semester III</b>				
1	19E13C3012	Bimbingan dan Konseling	2	W
2	19E13C3022	Psikologi Pendidikan	2	W
3	19E13C3033	Teori dan Apresiasi Puisi Bugis	3	W
	19E13C3043	Teori dan Apresiasi Puisi Makassar		
4	19E13C3052	Sosiolinguistik	2	W
5	19E13C3062	Psikolinguistik	2	W
6	19E13C3073	Maqbicara Ugi	3	W
	19E13C3083	Akbicara Mangkasarak		
7	19E13C3093	Marruqi Ugi	3	W
	19E13C3103	Anngukirik Mangkasarak		
8	19E13C3113	Sintaksis Bahasa Bugis	3	W
	19E13C3123	Sintaksis Bahasa Makassar		
9	19E13C3132	Literasi Digital Bahasa Bugis	2	P
	19E13C3142	Literasi Digital Bahasa Makassar		
10	19E13C3152	Panngaderreng	2	P
	19E13C3162	Panngadakkang		
<b>Jumlah</b>			<b>24</b>	
<b>Semester IV</b>				
1	19E13C4013	Kewirausahaan	3	W
2	19E13C4022	Manajemen Sekolah	2	W
3	19E13C4032	Retorika Bahasa Bugis	2	W
	19E13C4042	Retorika Bahasa Makassar		
4	19E13C4053	Analisis Wacana Bahasa Bugis	3	W
	19E13C4063	Analisis Wacana Bahasa Makassar		
5	19E13C4073	Semantik Bahasa Bugis	3	W

	19E13C4083	Semantik Bahasa Makassar		
6	19E13C4093	Apresiasi Prosa Sastra Bugis	3	W
	19E13C4103	Apresiasi Prosa Sastra Makassar		
7	19E13C4113	Telaah Kurikulum dan Buku Teks Pelajaran Bahasa Bugis	3	W
	19E13C4123	Telaah Kurikulum dan Buku Teks Pelajaran Bahasa Makassar		
9	19E13C4133	Perencanaan Pembelajaran Bahasa Bugis	3	W
	19E13C4143	Perencanaan Pembelajaran Bahasa Makassar		
10	19E13C4152	Pappasang	2	P
	19E13C4162	Pappasang		
		<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	
<b>Semester V</b>				
1	19E13C5012	Pragmatik Bahasa Bugis	2	W
	19E13C5022	Pragmatik Bahasa Makassar		
2	19E13C5032	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Bugis	2	W
	19E13C5042	Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Makassar		
3	19E13C5052	Filologi	2	W
5	19E13C5063	Penelitian Pembelajaran Bahasa Bugis	3	W
	19E13C5073	Penelitian Pembelajaran Bahasa Makassar		
6	19E13C5083	Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Bugis	3	W
	19E13C5093	Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Bugis		
7	19E13C5102	Menulis Puisi Kreatif Bahasa Bugis	2	W
	19E13C5112	Menulis Puisi Kreatif Bahasa Bugis		
8	19E13C5123	Apresiasi Drama Bugis	3	W
	19E13C5133	Apresiasi Drama Makassar		
4	19E13C5143	Apresiasi Tolog dan Massureq	3	W
	19E13C5153	Apresiasi Sinrilik dan Royong		
9	19E13C5162	Analisis Teks Buku Bahasa Bugis	2	P
	19E13C5172	Analisis Teks Buku Bahasa Makassar		
10	19E13C5182	Jurnalistik	2	P
		<b>Jumlah</b>	<b>24</b>	
<b>Semester VI</b>				
1	19E13C6012	Kritik Sastra Bugis	2	W
	19E13C6022	Kritik Sastra Makassar		
2	19E13C6032	Penulisan Karya Ilmiah	2	W
3	19E13C6043	Penelitian Budaya Bugis	3	W
	19E13C6053	Penelitian Budaya Makassar		
4	19E13C6063	Penilaian Pembelajaran Bahasa dan Sastra Bugis	3	W
	19E13C6073	Penilaian Pembelajaran Bahasa dan Sastra Makassar		

5	19E13C6083	Pengembangan Materi dan Media Pembelajaran Bahasa Bugis	3	W
	19E13C6093	Pengembangan Materi dan Media Pembelajaran Bahasa Makassar		
6	19E13C6103	Keterampilan Dasar Mengajar (Magang 1)	3	W
7	19E13C6112	Sejarah Sastra	2	W
8	19E13C6122	Praktik Penyuluhan Bahasa Bugis	2	P
	19E13C6132	Praktik Penyuluhan Bahasa Makassar		
9	19E13C6142	Kritik Teks	2	P
10	19E13C6152	Pengeditan	2	P
<b>Jumlah</b>			<b>24</b>	
<b>Semester VII</b>				
1	19E13C7011	Seminar Proposal Penelitian	1	W
2	19E13C7024	Praktik Lapangan Persekolahan (PLP 2)	4	W
3	19E13C7034	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	4	W
		Kesenian dan tari Sulawesi Selatan	2	P
		Sastra Pertunjukan	2	P
<b>Jumlah</b>			<b>13</b>	
<b>Semester VIII</b>				
1	19E13C8016	Skripsi	6	W
		<b>SKS yang Ditawarkan</b>	<b>155</b>	
		<b>MK Wajib</b>	<b>135</b>	
		<b>MK Pilihan</b>	<b>20</b>	
		<b>SKS yang harus ditempuh</b>	<b>145</b>	

### C. SIMPULAN

Pengembangan kurikulum prodi bahasa daerah disusun daengan berlandaskan pada fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Pengembangan kurikulum merupakan hak dan kewajiban masing-masing perguruan tinggi, namun demikian harus berlandaskan mulai dari UUD 1945, UU No.12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, serta ketentuan lain yang berlaku.

Kurikulum Prodi Bahasa dan Sastra Daerah (Bugis dan Makassar) diharapkan mampu memberikan bekal kkepada mahasiswa yang memiliki sikap dan *pabudi* pekerti yang baik, menguasai ilmu pengetahuan tentang bahasa, sastra, dan budaya Bugis/Makassar, dan menguasai keterampilan tertentu yang berorientasi pada literasi baru sehingga dapat berkontribusi dalam

pembangunan, merajut keharmonisan dalam keberagaman, dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, L., & Krathwohl, D. 2001. *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing A Revision of Bloom's Taxonomy of Education Objectives*, New York; Longman.
- Daeng, Kembong, dkk. 2018. "Pengembangan Kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah UNM. Makassar:UNM
- Direktorat Pembelajaran. 2019. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Industri 4.0*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek dan Pendidikan Tinggi.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. 2015. Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan No. 79 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
- Slattery, P. 2006. *Curriculum Development in the Postmodern Era (2.ed)*. New York: Routledge.
- Taba, H. 1962. *Curriculum Development: Theory and Practice*: USA: Harcourt Brace.
- UU No.12 Tahun 2012, Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.
- Zais, R.S. 1976. *Curriculum Principle and Foundations*. New York: Harper & Row.